

STRUKTUR YANG MEMBERDAYAKAN DALAM PRAKTEK SOSIAL PELANGGARAN LALU LINTAS

Oleh:

1. Wahyu Pramono; 2. Dwyanti Hanandini

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email: wahyu.pramonopd2@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat pelanggaran di kota Padang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Pelanggaran lalu lintas tidak mengenal perbedaan umur dan tingkat pendidikan. Melihat pelanggaran lalu lintas sebagai perilaku menyimpang mempunyai kelemahan karena menganggap aktor sebagai pelaku tindak pelanggaran lalu lintas bertindak pasif dan tidak berkuasa terhadap peraturan lalu lintas yang mengaturnya. Pada dasarnya aktor bertindak aktif menggunakan kekuasaan berupa pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas yang mengaturnya dalam berlalulintas. Oleh karena itu untuk memahami tindak pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat harus dipahami juga dalam relasinya dengan struktur sebagai hubungan yang bersifat dualitas. Makalah ini akan menjelaskan dualitas struktur dan agensi dalam praktek sosial berlalulintas yang dapat menimbulkan tindak pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan praktik sosial yang melibatkan struktur dan agensi. Hubungan struktur dan agensi yang bersifat dualitas menyebabkan dinamika tindakan individu dalam berlalulintas. Kesadaran praktik yang tinggi dalam berlalulintas akan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Kata kunci: Struktur, agensi, praktek social, pelanggaran, lalu lintas.

PENDAHULUAN

Di Kota Padang, pada tahun 2017 sampai bulan Juni jumlah pelanggaran lalu lintas sudah mencapai 11.816 kasus. Kondisi tahun 2017 tersebut sebenarnya tidak berbeda dengan kondisi pelanggaran lalu lintas pada tahun 2016. Pelaku pelanggaran lalu lintas yang paling banyak (16,271 kasus) adalah pengemudi usia 22-30.

Di lihat dari segi pendidikan, pelanggaran lalu lintas juga dilakukan oleh pengemudi dari berbagai tingkat pendidikan dari SD sampai Perguruan Tinggi. Pengemudi yang berpendidikan SMA merupakan jumlah tertinggi pelanggar lalu lintas. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena pengemudi yang lebih tinggi tingkat pendidikannya lebih banyak melanggar lalu lintas dibandingkan dengan pengemudi yang berpendidikan rendah (SD).

Orang dewasa maupun orang tua yang menggunakan kendaraan bermotor juga melakukan pelanggaran lalu lintas. Orang dewasa dan orang tua yang dianggap sebagai orang yang sudah mapan dan memahami peraturan lalu lintas tidak selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika menggunakan jalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan lalu lintas tidak selalu dapat mencegah pengendara kendaraan bermotor melakukan pelanggaran.

Pelanggaran lalu lintas dalam perspektif teori masalah sosial dianggap sebagai perilaku menyimpang. Kemampuan struktur dalam mengekang pelaku pelanggaran lalu lintas merupakan factor penyebab pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas[1]. Pemahaman ini menekankan kepada tindakan aktor yang dianggap tidak berdaya terhadap struktur yang menekanya. Tindakan aktor yang tidak sesuai dengan struktur dianggap sebagai perilaku menyimpang.

Upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas dalam pandangan teori perilaku menyimpang lebih ditekankan kepada perilaku pengguna jalan. Struktur dianggap sebagai pengekang yang akan mampu mengendalikan pelaku. Peningkatan kontrol sosial (tilang, operasi lalu lintas) dan sosialisasi norma sosial (peraturan lalu lintas) menjadi alat agar pelaku patuh terhadap struktur.

Memahami pelanggaran lalu lintas sebagai perilaku menyimpang nampaknya kurang dapat menjelaskan berbagai fenomena pelanggaran lalu lintas yang berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh berbagai kalangan usia dan pendidikan mengalami kenaikan dari bulan ke bulan dalam tahun 2017 dan dari tahun ke tahun (2014-2016). Berbagai usaha yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas nampaknya masih belum berhasil menurunkan frekuensi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Melihat pelanggaran lalu lintas sebagai perilaku menyimpang mempunyai kelemahan karena menganggap aktor sebagai pelaku tindak pelanggaran lalu lintas bertindak pasif dan tidak berkuasa terhadap peraturan lalu lintas yang mengaturnya. Pada dasarnya aktor bertindak aktif menggunakan kekuasaan berupa pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas yang mengaturnya dalam berlalulintas. Oleh karena itu untuk memahami tindak pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat harus dipahami juga dalam relasinya dengan struktur sebagai

hubungan yang bersifat dualitas. Makalah ini akan menjelaskan dualitas struktur dan agensi dalam praktek sosial berlalulintas yang dapat menimbulkan tindak pelanggaran lalu lintas.

STRUKTUR DAN AGENSI DALAM PRAKTEK SOSIAL BERLALULINTAS

Berlalulintas merupakan praktek sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang melibatkan struktur dan agensi. Berdasarkan teori strukturasi Giddens jalinan struktur dan agensi dalam praktek sosial merupakan dualitas. Hubungan struktur dengan agensi bukan dualism melainkan dualitas. Struktur dan agensi tidak dipandang sebagai dua hal yang terpisah. Struktur dan agensi, menurut Giddens, harus dipandang sebagai dualitas (*duality*), dua sisi mata uang yang sama. Hubungan antara keduanya bersifat dialektik, dalam arti struktur dan agensi saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung terus menerus, tanpa henti [2].

Struktur dalam pengertian Giddens adalah *rules and resources* yang dipakai pada sistim produksi dan reproduksi, sedangkan “agensi” adalah individu yang melakukan *social practices ordered across space and time*. Struktur sebagai aturan dan sumber daya yang digunakan oleh agen dalam interaksi. Aturan (*rules*) adalah prosedur yang digeneralisasi dan metodologi yang dimiliki oleh agent reflektif dalam “*stocks of knowledge*” yang implisit dan digunakan sebagai formula bagi tindakan dalam sistem sosial. Struktur juga melibatkan penggunaan sumber daya (*resources*) yang terdiri dari peralatan material dan kapasitas organisasional. Sumber daya merupakan hasil dari penguasaan peralatan material dan organisasi dan mereka yang memiliki sumber daya bisa memobilisasi kekuasaan.

Struktur mempengaruhi agensi melalui dua cara yaitu memampukan (*enabling*) dan menghambat (*constraining*). Gambaran kontradiktif dalam pengertian struktur ini karena struktur dilihat sebagai hasil (*outcome*) sekaligus sarana (*medium*) praktik sosial. Dualitas antara struktur dan pelaku terletak pada proses di mana struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dari praktek sosial. Selain itu struktur sekaligus merupakan sarana (*medium*) yang memungkinkan berlangsungnya praktek sosial. Struktur memiliki sifat memberdayakan (*enabling*) yang memungkinkan praktek social [3]. Wujud dari struktur merupakan aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan perulangan praktik sosial [4].

Dalam praktek sosial, agensi dapat meninggalkan struktur dan tidak selalu tunduk pada struktur. Agensi dapat mencari kesempatan maupun kemungkinan untuk keluar dari peraturan dan ketentuan yang ada. Situasi ini disebut *dialectic of control*. Agensi dapat melawan struktur yang berupa Kontrol.

Pusat perhatian teori strukturasi bukan pada struktur dan juga bukan pada agensi, melainkan apa yang oleh Giddens disebut *social practices*. Struktur dan agensi harus dijelaskan secara detil tetapi analisis tetap harus difokuskan pada praktek sosial, yaitu bagaimana manusia-manusia menjalani hidup sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan anak-istri/suami, sahabat, maupun dengan birokrat, pelayan bank, dan lain-lain. Melalui praktek sosial tersebut, masyarakat manusia diproduksi dan direproduksi secara terus menerus setiap hari dalam ruang dan waktu.

Giddens membedakan 3 (tiga) dimensi internal pelaku, yaitu motivasi tak sadar (*unconscious motives*), kesadaran praktis (*practical consciousness*), dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) [5]. Motivasi tak sadar (*unconscious motives*) menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Berbeda dengan motivasi tak sadar, kesadaran diskursif (*discursive consciousness*) mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Dengan kata lain terdapat sejumlah alasan bagi semua tindakan kita.

Sedangkan kesadaran praktis (*practical consciousness*) menunjuk pada gugus pengetahuan yang tidak selalu bisa diurai. Dalam fenomenologi, inilah wilayah kepribadian yang berisi gugus pengetahuan yang sudah diandaikan (*taken for granted knowledge*). Gugus pengetahuan yang sudah diandaikan ini merupakan sumber “rasa aman ontologis” (*ontological security*). Melalui gugus pengetahuan praktis ini, kita tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus terus menerus mempertanyakan apa yang terjadi atau yang mesti dilakukan. Demikian pula kita hampir tidak pernah bertanya mengapa kita menghentikan kendaraan ketika lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Rutinisasi hidup personal dan sosial terbentuk melalui kinerja gugus kesadaran praktis ini [6].

Struktur berbeda dengan sistem menurut pengertian teori strukturasi. Struktur dipahami dari dimensi sintagmatik dan paradigmatik dalam penstrukturan hubungan-hubungan sosial. Dimensi sintagmatik dapat dilihat dari reproduksi praktek-praktek yang terikat pada ruang dan waktu tertentu. Sementara itu dimensi paradigmatik dapat dilihat dari tata cara-cara penstrukturan yang terjadi berulang kali dalam proses reproduksi. Karenanya struktur merujuk pada sifat-sifat penstrukturan yang memberikan bentuk sistemik pada kegiatan-kegiatan sosial serupa dan yang memungkinkan mereka bertahan dalam lintas ruang dan waktu [7].

Sedangkan system sosial berkaitan dengan praktek sosial yaitu praktek-praktek sosial yang direproduksi [8]. Praktek sosial terikat dengan ruang dan waktu. Praktek sosial yang direproduksi merupakan kegiatan-kegiatan yang terikat pada ruang dan waktu tertentu yang diadakan kembali dalam lintas ruang dan waktu yang secara berulang melibatkan struktur di dalamnya.

STRUKTUR YANG MEMBERDAYAKAN DALAM PRAKTEK SOSIAL PELANGGARAN LALU LINTAS

Pelanggaran lalu lintas merupakan praktek sosial, karena merupakan kegiatan pengendara kendaraan bermotor yang terikat dengan waktu kapan dan dimana pelanggaran tersebut dilakukan secara berulang terhadap peraturan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat terjadi berulang dalam ruang dan waktu yang berbeda dengan melibatkan peraturan lalu lintas yang sama, karenanya struktur mengatasi ruang dan waktu. Melanggar lampu lalu lintas dapat terjadi di perempatan jalan dan waktu yang berbeda, tetapi peraturan lalu lintas yang dilanggar sama, yaitu pengendara dilarang berjalan ketika lampu merah menyala.

Struktur akan terwujud seketika dalam sistem sosial dan jejak-jejak ingatan, keduanya berguna sebagai orientasi perilaku manusia. Gambaran tersebut memberikan penjelasan bahwa struktur dalam pengertian tersebut tidak berada di luar individu. Dualitas struktur merupakan sumber terjadinya strukturasi yang merupakan relasi-relasi sosial yang melintasi waktu dan ruang. Oleh karena itu proses praktek-praktek sosial menjadi struktur hanya bisa terjadi dalam lintas ruang dan waktu. Ruang dan waktu dipandang turut membentuk kegiatan sosial secara integral [9].

Manusia dipandang bukan sebagai kumpulan tindakan atau tindakan yang terpisah-pisah tetapi merupakan proses yang terus menerus yang terikat dalam ruang dan waktu. Konsep-konsep seperti maksud, alasan, sebab dan rasionalisasi dilihat sebagai suatu proses bukan keadaan [10]. Artinya, perbedaan ruang dan waktu akan memberikan maksud, alasan, sebab, dan rasionalitas yang berbeda terhadap tindakan. Dalam konteks individu melakukan pelanggaran lalu lintas akan mempunyai maksud, alasan, sebab dan rasionalisasi yang berbeda berdasarkan ruang dan waktu. Ini artinya ketika individu melakukan tindak pelanggaran lalu lintas hari ini bisa jadi mempunyai alasan, maksud, sebab dan rasionalisasi yang berbeda dengan tindak pelanggaran yang dilakukan kemarin. Hari ini individu dapat patuh terhadap peraturan lalu lintas, besok pagi belum tentu individu akan patuh terhadap peraturan yang sama pada waktu dan tempat yang sama, kecuali tindakan tersebut sudah menjadi bagian rutinitas individu.

Hasil penelitian menunjukkan jumlah remaja yang mempunyai pengetahuan yang baik terhadap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan nampaknya tidak diikuti oleh perilakunya dalam berlalulintas yang baik. Jumlah remaja yang pernah dan kadang-kadang melakukan pelanggaran lalu lintas cukup tinggi yaitu 64.5%. Sementara hanya 34.5% yang tidak pernah melanggar rambu-rambu lalu lintas [11]. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan sekali tetapi berulang kali untuk semua jenis rambu-rambu lalu lintas.

Kepatuhan individu terhadap peraturan lalu lintas tanpa dipertanyakan terjadi ketika tindakan individu sudah menjadi rutinitas. Sesuatu yang rutin inilah yang menjadi elemen dasar kegiatan sosial hari per hari. Apa yang rutin ini menunjukkan adanya keterulangan kegiatan sosial dalam lintas waktu-ruang inilah yang menurut Giddens sebagai rutinitasi (*routinization*). Apa yang rutin dari suatu kehidupan sosial menjadi bahan dasar bagi apa yang disebutnya sebagai hakekat keterulangan kehidupan social [12]. Dari keterulangan ini maka sifat-sifat terstruktur dari kegiatan sosial yang terus menerus diciptakan kembali dari sumber-sumber daya yang dibentuknya.

Terdapat tiga gugus besar struktur dalam dualitas struktur yaitu signifikasi (*signification*), dominasi (*domination*) dan legitimasi (*legitimation*) [13]. Struktur signifikasi atau penandaan adalah struktur yang menyangkut simbolik, pemaknaan, penyebutan dan wacana. Adapun struktur dominasi atau penguasaan mencakup penguasaan atau orang dan barang. Penguasaan atas orang berkaitan dengan politik. Sementara penguasaan terhadap barang berkaitan dengan bidang ekonomi. Struktur legitimasi atau membenaran menyangkut peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum [14].

Ada dua macam sumber daya yang terlibat dalam membentuk struktur dominasi, yaitu sumberdaya alokatif dan otoritatif [15]. Pertama, sumber daya alokatif yaitu yang memungkinkan dominasi manusia atas dunia material. Sumber daya alokatif ini seperti misalnya bahan mentah, peralatan produksi, teknologi, hasil-hasil produksi. Kedua, adalah sumber daya otoritatif. Sumber daya ini yang memungkinkan dominasi manusia atas dunia sosial. Sumber daya otoritatif ini seperti misalnya pengorganisasian ruang-waktu, organisasi dan relasi manusia dalam asosiasi timbal balik.

Ketika individu menggunakan kekuasaan dalam struktur di dalamnya terdapat apa yang disebut sebagai *rules* dan baik pada sumber daya alokatif maupun sumber daya otoritatif. Sumber daya merupakan media kekuasaan pada tataran praktis dan sekaligus media struktur dominasi yang direproduksi. Karenanya Giddens melihat peran sumber daya merupakan faktor vital bagi individu dalam mewujudkan kekuasaan. Sumber daya inilah yang memampukan individu untuk melakukan dominasi dengan pihak lain. Atau dengan kata lain dengan sumber daya individu telah menciptakan struktur dominasi [16].

Dalam praktek sosial berlalulintas ketiga struktur tersebut dapat berada dalam dan digunakan oleh satu orang yang menduduki status sosial dalam masyarakat. Seorang yang berstatus polisi (struktur signifikansi) menyebabkan mereka dapat menilang (menggunakan struktur dominasi) para pengendara kendaraan bermotor yang

tidak patuh pada aturan berlalu lintas. Wewenang polisi untuk menindak para pelanggar lalu lintas ini dibenarkan (struktur legitimasi) oleh aturan-aturan hukum.

Seorang aktor mampu mewujudkan tindakannya bukan hanya karena motivasi dan keinginan dirinya sendiri tetapi juga karena ia mengadaptasikan struktur dan sekaligus struktur memberinya keberdayaan yang memungkinkan tindakannya direalisasikan. Kekuasaan dipahami oleh Giddens sebagai suatu dominasi melalui mobilisasi sumberdaya struktur dominasi yang dimiliki oleh para aktor. Kekuasaan dihasilkan dalam dan melalui reproduksi struktur-struktur dominasi. Seseorang yang mempunyai kekuasaan adalah mereka yang menguasai sumberdaya dan mampu menyalurkannya pada pihak lain yang dinyatakan sebagai bawahannya.

Kekuasaan tidak dapat dipertahankan jika ia hanya mendasarkan pada kemampuan memaksa sebab ketundukan seseorang terhadap ketakutan pada orang lain hanyalah ketundukan semu. Ketundukan tersebut akan berubah apabila seseorang memperoleh kesempatan dan momentum untuk melawan maka ia akan melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaannya. Hal terlihat dari alasan mengapa seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas. Letak lampu lalu lintas di jalan yang sepi merupakan momentum untuk melakukan pelanggaran [17].

Ketiadaan polisi di perempatan jalan tempat rambu lalu lintas berada nampaknya tidak menjadi alasan kuat untuk melanggar lalu lintas. Hal ini memperlihatkan polisi mampu menyalurkan sumber daya yang dipunyai kepada pengguna jalan sehingga individu masih terdominasi oleh kekuasaan polisi meskipun secara fisik politiknya tidak kelihatan. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah kekuasaan yang dapat menyalurkan sumberdaya yang dibutuhkan oleh orang lain pada seseorang. Seorang aktor (polisi) mampu mendominasi pihak lain (pengguna jalan) apabila ia menguasai struktur-struktur sosial yang mendasari hubungan-hubungan sosial dalam berlalulintas.

Kemampuan polisi menguasai struktur signifikasi (peraturan lalu lintas) misalnya pada akhirnya menjadi fasilitas bagi mereka untuk mendominasi dan memobilisasi masyarakat pengguna lalu lintas. Pengguna lalu lintas menerima dominasi kekuasaan polisi melalui sikap kepatuhan dan ketundukan yang mereka maknai sebagai sesuatu yang alamiah atau natural. Tindakan dan praktik sosial kepatuhan dan ketundukan masyarakat itu lambat-laun menjadi praktik rutinitas bagi mereka. Praktik rutinitas ini terjadi karena apa yang menjadi tindakan rutin itu dilakukan berdasarkan refleksi dari kesadaran praktis. Melakukan sesuatu yang telah menjadi kesadaran praktis membangkitkan rasa aman bagi pelakunya, sehingga dengan sendirinya mendorong mereka melakukannya secara berulang-ulang.

Tindakan berulang dari pengguna lalu lintas yang telah mempunyai kesadaran praktis berlalulintas membuat individu patuh terhadap peraturan lalu lintas sehingga tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Kesadaran praktis berlalulintas dapat ditumbuhkan melalui proses pengenalan secara terus menerus mengenai peraturan lalulintas kepada pengguna jalan.

SIMPULAN

Pelanggaran lalu lintas merupakan praktik sosial yang melibatkan struktur dan agensi. Hubungan struktur dan agensi yang bersifat dualitas menyebabkan dinamika tindakan individu dalam berlalulintas. Kesadaran praktik yang tinggi dalam berlalulintas akan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hanandini, Dwiyaniti. At.all.: "Model Sosialisasi-Internalisasi Norma Sosial Berlalulintas Untuk Mencegah Dan Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Kalangan Remaja", *Laporan Penelitian*, LP3M Universitas Andalas, Padang, (2018).
- [3] Giddens, Anthony.: *Central Problems in Social Theory*. London: Macmillan, (1979)
- [4] Giddens, Anthony.: *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, (1984)
- [5] Herry-Priono, B.: Anthony Giddens, Suatu Pengantar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, (2002)
- [6] Herry-Priono, B.: Anthony Giddens, Suatu Pengantar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, (2002)
- [7] Priyono dan Hartono dalam Basis.: *Dunia Yang Tunggang Langgang dalam Basis menembus fakta edisi khusus Anthony Giddens*. Januari - Februari, Nomor 01- 02, Tahun ke-49), Yogyakarta: Yayasan BP Basis. (200)
- [8] Giddens, Anthony.: *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, p.17, (1984)
- [9] Giddens, Anthony.: *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press,p.142, (1984)
- [10] Giddens, Anthony.: *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, p.3, (1984)
- [11] Hanandini, Dwiyaniti. At.all.: "Model Sosialisasi-Internalisasi Norma Sosial Berlalulintas Untuk Mencegah Dan Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Kalangan Remaja", *Laporan Penelitian*, LP3M Universitas Andalas, Padang, (2018).
- [12] Giddens, Anthony.: *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press, p.xxiii, (1984)
- [13] Giddens, Anthony.: *Central Problems in Social Theory*. London: Macmillan, p.82(1979)
- [14] Herry-Priono, B.: Anthony Giddens, Suatu Pengantar. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, p.13, (2002)
- [15] Giddens, Anthony.: *Central Problems in Social Theory*. London: Macmillan, p.100, (1979)
- [16] Giddens, Anthony.: *Central Problems in Social Theory*. London: Macmillan, p.92(1979)

- [17] Hanandini, Dwiyantri. At.al.: “Model Sosialisasi-Internalisasi Norma Sosial Berlalulintas Untuk Mencegah Dan Mengurangi Terjadinya Kecelakaan Lalulintas Di Kalangan Remaja”, *Laporan Penelitian*, LP3M Universitas Andalas, Padang, (2018).